

## POLITIK IDENTITAS DAN POLITISASI AGAMA DALAM KONTEKS PEMILU DI INDONESIA

Firdaus M. Yunus<sup>1\*</sup>, Taslim HM. Yasin<sup>2</sup>, Syamsul Rijal<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

\*Corresponding Author: [firdaus.myunus@ar-raniry.ac.id](mailto:firdaus.myunus@ar-raniry.ac.id)

### ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the phenomenon of the growing identity politics and religious politicization leading up to elections in Indonesia. Through a description of the facts that have transpired in recent years, this study portrays the reality of the increasing identity politics, stemming from group characteristics such as ethnicity, religion, and tribe, which have impacted political dynamics and the formation of specific political alliances. The influence of social media and information technology has also contributed to reinforcing identity politics and religious politicization in the past decade. In this research, a qualitative descriptive method is employed, with the aim of uncovering previously undisclosed realities. Confronting these challenges, the study underscores the importance of political education, enhancing public awareness, as well as fostering an inclusive and tolerant society. With a focus on substantive issues and sustainable development, preserving unity amidst diversity is essential as the foundation for building an inclusive and dignified democracy.

**Keywords:** *Identity Politics, Religious Politicization, Elections, Public Awareness, Inclusivity*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis fenomena berkembangnya politik identitas dan politisasi agama menjelang pemilu di Indonesia. Melalui deskripsi fakta-fakta yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, penelitian ini menggambarkan realitas meningkatnya politik identitas, yang berasal dari karakteristik kelompok seperti, etnis, agama, dan suku, telah mempengaruhi dinamika politik dan pembentukan aliansi-aliansi politik tertentu. Pengaruh media sosial dan teknologi informasi juga telah ikut memperkuat politik identitas dan politisasi agama dalam satu dekade terakhir ini. Dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan, dengan metode ini diharapkan dapat menggambarkan realitas yang sebelumnya belum terungkap. Dalam menghadapi tantangan ini, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik, peningkatan kesadaran publik, serta pembangunan masyarakat yang inklusif dan toleran. Dengan fokus pada isu-isu substansial dan pembangunan berkelanjutan diperlukan memelihara persatuan dalam keragaman sebagai dasar untuk membangun demokrasi yang inklusif dan bermartabat.

**Kata Kunci:** *politik identitas, politisasi agama, pemilu, kesadaran publik, inklusivitas*

## **PENDAHULUAN**

Setiap menjelang pelaksanaan pemilu berbagai akrobatik politik muncul ke ranah publik, akrobatik tersebut bukan saja tersaji melalui adu gagasan, justru yang paling banyak ditemukan di lapangan adalah saling serang antar pendukung dari masing-masing calon. Faktor pemicunya pun bermacam-macam, mulai dari saling ejek antar pendukung hingga merusak alat peraga pemilu dari pasangan-pasangan calon lainnya.

Secara teoretis hakikat pemilu adalah untuk membangun sistem demokrasi berkeadilan, sehingga semua pihak wajib menghormati beda pilihan, karena dengan berbeda-beda pilihan maka mesin demokrasi sudah benar-benar berjalan. Ada fakta menarik dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini, bahwa teori demokrasi semakin tertinggal dari realitas berdemokrasi, fenomena tersebut secara terang benderang tersaji melalui kampanye hitam yang tujuannya untuk menyerang pihak lawan secara verbal seperti membakar posko pemenangan, membakar bendera partai, membakar mobil operasional partai, dan membakar rumah simpatisan. Dalam bentuk non verbal berupa teror, dan ancaman-ancaman menjelang pelaksanaan pemilu hingga di hari penetapan pemenang pemilu.

Selain beberapa fakta di atas, politik identitas dan politisasi agama suatu tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam konteks pemilu sekarang dan akan datang. Politik identitas mengacu pada praktik politik yang didasarkan pada karakteristik kelompok tertentu seperti etnis, agama, dan suku. Ketiga kelompok tersebut menjadi aktor yang memiliki kemampuan mempengaruhi pemilih dalam mengambil keputusan politik masing-masing. Dalam konteks politik identitas, masyarakat cenderung mengidentifikasi diri mereka dengan kelompok identitas tertentu dan memilih berdasarkan afiliasi kelompok tersebut. Politik identitas sering muncul dalam retorika politik, strategi kampanye, dan pembentukan koalisi politik. Hal ini mempengaruhi cara pemilih dalam memilih calon dan partai politik serta memengaruhi dinamika politik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia.

Politik identitas secara terminologis berbeda dengan identitas politik maupun politisasi identitas. Politik identitas lebih fokus pada aktivitas seseorang atau kelompok dalam mengambil peran untuk memobilisasi pengalaman, masalah politik, dan tujuan berdasarkan nilai-nilai identitas kelompok (Clarissa Rile Hayward, 2010). Sementara identitas politik lebih dimaknai sebagai upaya untuk menentukan posisi kepentingan seseorang di dalam ikatan suatu

komunitas politik tertentu (Haboddin, 2012). Sedangkan politisasi identitas sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas, baik berdasarkan agama, etnis atau ketaatan pada ideologi tertentu, yang tujuannya menciptakan opini demi keuntungan politik seseorang atau kelompok tertentu (Herdiansah, 2017).

Secara realitas politik identitas di Indonesia menguat ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 (Rizqullah Naufan & Hannase, 2021). Pada pemilu tersebut pertarungan politik identitas begitu kentara terlihat, sehingga berdampak pada polarisasi dan konflik sosial di dalam masyarakat. Dinamika politik demikian sekarang subur lagi di beberapa tempat menjelang pemilu 2024 dan dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan masyarakat dan kesatuan bangsa.

Di sisi lain faktor yang memperkuat politik identitas di Indonesia di dalamnya juga sejarah dan keberagaman budaya, keberagaman ini sebagai anugerah terbesar karena negeri ini dianugerahi populasi terbesar keempat di dunia yang sekarang penduduknya mendiami beribu pulau, berbicara dalam ratusan bahasa, dan menganut berbagai agama serta aliran kepercayaan sebagai wujud dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia (Zahrotunnimah, 2018). Keberagaman sebagai anugerah ini kadang kala dapat menjadi sumber malapetaka jika dipolitisasi. Karena politisasi sekarang sudah menjamah ke semua ranah, termasuk ke ranah agama, dan ini menjadi bahaya sebab akan membentuk polarisasi di masyarakat sekaligus menguatkan politik identitas.

Faktor ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, dan konflik politik merupakan indikator yang dapat memperkuat politik identitas (Putra & Riyanto, 2023). Apalagi terdapat kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan oleh kultur dan struktur negara sehingga mendorong kelompok yang merasa ‘rentan’ menggunakan politik identitas, sebagai alat untuk memperoleh kekuatan politik dan perubahan sosial. Di era 5.0 dengan berbagai kecanggihan buatan seperti hadirnya *artificial intelligence* (AI) telah membingkai perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Pesatnya perkembangan media tersebut turut menguatkan politik identitas, termasuk politisasi agama (Achmad, 2018).

Media sosial memberikan platform yang memungkinkan penyebaran pesan-pesan identitas yang cenderung sempit dan memperkuat kesenjangan antar kelompok. Informasi yang tidak diverifikasi dengan baik atau disebarakan secara tidak bertanggung jawab dapat memicu

konflik atau memperdalam pemisahan antar kelompok (Achmad, 2018). Dalam konteks pemilu, menguatnya politik identitas dapat berdampak pada kualitas demokrasi. Pemilih cenderung memilih berdasarkan identitas mereka, bukan berdasarkan program atau kualifikasi calon. Ini dapat mengaburkan fokus pada isu-isu substansial yang penting bagi pembangunan negara. Selain itu, politisasi agama juga dapat memperkuat sentimen eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, yang melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan.

Dalam konteks yang semakin kompleks ini, penting bagi kita untuk memperhatikan peran pendidikan politik, peningkatan kesadaran publik, dan pembangunan masyarakat yang inklusif dan toleran. Sehingga keberagaman adalah kekuatan yang harus dijadikan landasan dalam membangun negara yang kuat dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam membangun kesadaran, pemahaman, dan pengertian yang lebih baik tentang keberagaman, inklusivitas, dan persatuan di tengah politik identitas yang semakin menguat. Pendidikan politik yang baik, peningkatan kesadaran publik, serta promosi dialog dan toleransi antar kelompok identitas menjadi penting. Dalam konteks pemilu, penting bagi pemilih untuk melihat dan melampaui identitas sekaligus mempertimbangkan program, rekam jejak, serta integritas calon politik. Dengan demikian dapat memperkuat demokrasi yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Politik identitas dan politisasi agama merupakan fenomena yang semakin kuat dan kompleks di Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa ini memainkan peran penting dalam politik dan pemilihan umum. Perkembangan teknologi dan sejarah ketimpangan juga turut menguatkan politik identitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk membangun pemahaman yang inklusif dan persatuan yang kuat di tengah politik identitas yang semakin dominan..

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami realitas pelaksanaan pemilu, menguatnya politik identitas dan politisasi agama di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui verifikasi data primer dan data sekunder (Safrihsyah Syarif, 2013). Data yang digunakan adalah karya-karya yang ditulis dalam bentuk buku dan artikel-artikel jurnal terkait pemilu, politisasi agama dan menguatnya politik identitas di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang konkret mengenai pemilu, politisasi agama dan menguatnya politik identitas di Indonesia..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dinamika Masyarakat di Tahun Politik**

Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusi yang menentukan struktur dan mekanisme politik di negara republik Indonesia. Politik di Indonesia ditandai oleh peran aktif masyarakat berpolitik dan menentukan pilihan mereka pada partai-partai politik. Dalam satu dekade terakhir ini beberapa partai politik yang masih eksis di tengah masyarakat antara lain, partai Golkar, PDIP, Demokrat, PPP, PKS, Nasdem, Gerindra, dan PKB. Partai-partai ini menjadi kendaraan politik bagi calon politik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, menyusun program politik ketika calon politik terpilih sebagai anggota parlemen.

Sebagai negara demokrasi, partai politik dan calon politik memiliki peran penting dalam menentukan arah perpolitikan di Indonesia, arah tersebut sudah ditanamkan oleh masing-masing partai politik kepada calon politik, sehingga ketika menjadi pengusung amanah partai politik mereka harus mampu membimbing, membina, dan mencerahkan kehidupan masyarakat, bukan memanfaatkan masyarakat untuk melanggengkan syahwat politik palsu dirinya (Lestari, 2018). Selama ini fakta di lapangan menunjukkan bahwa anggota partai politik baru butuh masyarakat ketika mereka membutuhkan tiket suara dari masyarakat, hal ini telah menyebabkan arah politik menjadi berwarna-warna, atau ada yang sudah kehilangan warna karena masyarakat tidak menaruh percaya pada partai politik atau calon politik yang telah diusung dulunya, karena sepanjang tahun dianggap tidak mewakili konstituen ketika sudah duduk empuk di parlemen.

Sebagai gambaran umum bahwa politik Indonesia dibangun dari keberagaman budaya, etnis, agama, dan suku bangsa yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia, sebab Indonesia dengan kemajemukan yang dimiliki di satu sisi dihadapkan pada berbagai isu, permasalahan dan tantangan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi masih menjadi isu utama yang perlu ditangani secara serius oleh negara. Meskipun bangsa ini telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek, namun masih banyak penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan umumnya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang tidak merata. Selain faktor kemiskinan, korupsi juga menjadi permasalahan serius di Indonesia, dan praktik korupsi ini telah merambah ke berbagai lini, dan tidak saja terjadi pada lembaga vertikal, pada lembaga horizontal pun praktik ini semakin menjadi-jadi sehingga telah merugikan negara dan masyarakat. Untuk itu, upaya memerangi korupsi harus dilakukan secara serius melalui sistem hukum yang dijalankan oleh lembaga anti-korupsi guna memastikan setiap tindak pidana korupsi dihukum seberat-beratnya agar keadilan dapat ditegakkan di tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas diperlukan komitmen dari semua pihak, pada tahun 2023, indeks korupsi di Indonesia bukan mengalami penurunan, justru mengalami peningkatan secara signifikan, hasil peningkatan tersebut diketahui dari rilis Transparency International atas pengukuran indeks korupsi untuk tahun 2022. Dari hasil rilis secara serentak di seluruh dunia pada tanggal 31 Januari 2023, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapat perhatian dari lembaga ini karena indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia berada di skor 34/100. Persepsi ini telah menempatkan Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995 (International, 2023).

Selain korupsi, konflik agama juga menjadi permasalahan pelik di Indonesia hingga hari ini. Beberapa konflik agama seperti di Poso antara umat muslim dan Kristen, di Makassar penolakan pembangunan Gereja Jemaat Advent, di Bogor penolakan ajaran komunitas Ahmadiyah, (Marta, 2020) dan di Singkil pembakaran undang-undang sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen, semua kejadian tersebut mengakibatkan kerugian dan ketegangan di masyarakat (Mallia Hartani, 2020). Meskipun kasus demi kasus terjadi, pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun kerukunan antar umat agama dan menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama.

Beberapa isu lain, seperti isu lingkungan juga semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dan degradasi lingkungan telah menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi, dan perubahan iklim. Upaya perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian alam terus diupayakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan ini, penting untuk meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran publik. Pendidikan politik dapat membantu masyarakat memahami sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan membangun kapasitas dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Kesadaran publik yang tinggi tentang pentingnya partisipasi politik yang sehat, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Kondisi Politik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memiliki dinamika yang kompleks. Untuk itu, partai-partai politik harus memainkan peran penting dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menyusun program politik. Gambaran umum masyarakat Indonesia mencerminkan keberagaman budaya, semangat gotong royong, dan kekayaan sumber daya alam. Namun, masih terdapat permasalahan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, korupsi, konflik agama, dan isu lingkungan yang perlu ditangani. Pendidikan politik dan kesadaran publik yang tinggi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

### **Kondisi Politik Menjelang Pemilu**

Pemilu sebagai momen penting dalam menentukan perwakilan politik serta arah kebijakan negara. Dalam proses pemilu, terdapat perbedaan antara idealitas dan realitas pemilih. Idealitas pemilih merujuk pada harapan dan nilai-nilai yang diinginkan dalam pemilihan umum, sedangkan realitas pemilih menggambarkan situasi yang terjadi di lapangan. Untuk realitas pemilih sering kali dipengaruhi oleh faktor identitas seperti suku, agama, atau etnis. Pemilih sering kali cenderung memilih calon berdasarkan afiliasi identitas mereka, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh platform politik atau kualitas kepemimpinan calon tersebut. Salah satu faktor para pemilih tidak mempertimbangkan platform calon yang akan dipilih karena minimnya informasi yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Minimnya informasi disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan politik yang berkualitas. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan pemilih untuk melakukan evaluasi serta membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan yang matang.

Dalam menghadapi kondisi para pemilih, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih melalui pendidikan politik yang lebih baik dan akses yang

lebih luas terhadap informasi politik yang akurat agar dapat membantu pemilih menjadi lebih cerdas, kritis, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sudah menjadi pemandangan umum menjelang pemilu tensi suhu politik di seluruh wilayah menjadi semakin memanas yang disebabkan oleh kompleksitas persoalan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Kompleksitas ini terkait langsung dengan agenda pemilu, dimana persaingan politik, retorika, strategi partai, serta calon peserta yang maju dalam gelanggang politik mencapai puncaknya. Kondisi demikian ditandai oleh persaingan politik yang intensif antara partai-partai politik dan para kontestan yang dipercayakan oleh masing-masing partai. Persaingan ini membawa dampak yang luar biasa terhadap peta politik nasional dan lokal. Partai politik berlomba-lomba untuk memenangkan dukungan pemilih dan memperoleh kursi di lembaga legislatif serta memperebutkan posisi eksekutif di tingkat nasional maupun daerah.

Sebuah survei yang dilakukan oleh SMRC pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi politik di Indonesia berada di 56,6% masyarakat masih percaya dengan kondisi politik Indonesia, hanya 9,5% yang menilai kondisi politik berada dalam situasi buruk/sangat buruk, dan 21,5% menjawab situasi politik akan biasa-biasa saja, serta 12,4% tidak memberikan jawaban (Makdori, 2021). Hasil survei tersebut dapat di lihat di bawah ini:

## Kondisi Politik Setahun ke Depan

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan politik nasional pada umumnya setahun ke depan?  
Akan sangat baik, akan baik, akan sedang, akan buruk atau akan sangat buruk? ... (%)



Warga yang menilai kondisi politik nasional setahun ke depan akan baik/sangat baik sekitar 56,6%, sementara yang menilai akan buruk/sangat buruk 9,5%, dan ada 21,5% yang menilai akan sedang saja. Yang tidak tahu/tidak menjawab 12,4%.

Dalam survei lain yang dilakukan oleh SMRC pada Maret 2023 memperlihatkan tren yang sangat berbeda dimana sentimen positif terhadap kondisi politik Indonesia mengalami penurunan dalam 3.5 tahun ini. Sebanyak 3,3% responden menilai kondisi politik sangat baik, 30,6% menilai baik, dan 35,5 % menganggap sedang. Kemudian, 17,4 % responden berpendapat bahwa kondisi politik Tanah Air buruk, 2,1 % menilai sangat buruk, dan 11,0 % responden tidak menjawab atau tidak tahu. Jika ditarik mundur, pada September 2019, ada 41 persen responden yang menilai kondisi politik baik. Indikator ini berada pada titik terendah pada survei September 2021 di mana hanya 26,8 persen yang menilai kondisi politik baik (Makdori, 2021). Tren positif mengenai kondisi politik sempat naik pada Agustus 2022 menjadi 37,1 persen, lalu kembali turun pada Desember 2022 menjadi 35 persen, dan terbaru 34,0 persen pada survei Maret 2023 (Farisa, 2023).

Berikut ini adalah salah satu gambaran hasil survei SMRC yang dilakukan pada Maret 2022.



Hasil yang di rilis oleh SMRC salah satu lembaga survei di atas menggambarkan bahwa kondisi politik menjelang pemilu mengalami pasang surut dalam tiga tahun terakhir ini. Untuk itu, dalam konteks persaingan politik isu-isu utama yang diangkat menjadi penting. Calon-calon

politik sering kali mengarahkan fokus mereka pada isu-isu yang dianggap relevan dan memiliki dampak emosional besar bagi pemilih. Isu-isu seperti agama, kemiskinan, kesetaraan gender, pendidikan, lingkungan hidup, serta peran para pemimpin dalam kancah lokal, nasional, dan internasional menjadi fokus perdebatan politik sebagai upaya untuk memenangkan hati pemilih.

Fenomena persaingan seperti itu menjadi pemandangan biasa di tengah masyarakat dalam beberapa periode pemilu terakhir ini. Isu identitas memiliki pengaruh besar karena berkaitan erat dengan isu agama, suku, dan etnis, sehingga menjadi bumbu sedap yang laku dijual kepada calon pemilih. Penggunaan politik identitas ini secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi dinamika pemilu dan memperdalam polarisasi sosial.

Polarisasi sosial sekarang sangat cepat berkembang seiring kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial, media ini telah mengubah lanskap politik di Indonesia menjelang pemilu. Sebab media sosial menyediakan platform bagi partai politik, kandidat, dan pemilih untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan mengutarakan pandangan politik mereka. Namun, pengaruh media sosial juga memiliki sisi gelap, seperti penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian untuk menyudutkan dan membunuh karakter lawan politik. Masyarakat pada posisi demikian sengaja dibuat bingung sehingga tidak mampu lagi mencerna mana informasi yang valid dan tidak valid karena sudah bercampur aduk antara informasi yang benar dengan yang salah. Polarisasi sosial demikian akan terus meningkat dengan retorika-retorika kontroversial. Retorika yang dibangun pada umumnya retorika untuk menyerang dan mempertentangkan antara satu sama lain. Penyerangan pribadi, manipulasi informasi menjadi strategi yang sering digunakan, hal ini tidak hanya dapat mengaburkan fakta dan mengakibatkan kebingungan publik, tetapi juga dapat meningkatkan ketegangan dan konflik antar kelompok.

Masyarakat dalam kondisi demikian cenderung memilih pihak yang mendukung pandangan mereka dan menolak pandangan yang berbeda. Dinamika politik yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian di masyarakat, hal ini berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus mengancam sistem demokrasi yang sudah berjalan baik selama ini.

### **Menguatnya Politik Identitas**

Dalam satu dekade terakhir ini politik identitas semakin menguat hampir di seluruh wilayah Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu. Banyak ahli berpendapat bahwa pemicu menguatnya politik identitas karena faktor suku, etnis, agama, ideologi, dan gender. Faktor

tersebut bukan saja terjadi pada masyarakat Indonesia, di negara mana pun politik identitas dapat tumbuh, hanya skalanya saja yang berbeda-beda, karena dari beragam kelompok identitas memiliki kebutuhan, aspirasi, dan pandangan yang berbeda-beda. Politik identitas memungkinkan setiap kelompok untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Dalam realitas yang kompleks ini, politik identitas memainkan peran penting dalam mewujudkan pengakuan dan keseimbangan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk didalamnya politik.

Menjelang pemilu, politik identitas menjadi sebuah term yang tidak terelakkan hadir, karena semua orang atau kelompok memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan dan memperjuangkan identitas melalui jalur politiknya masing-masing. Identitas yang diperjuangkan bisa bermacam-macam, mulai dari identitas agama, suku, dan gender. Dalam politik identitas kelompok-kelompok cenderung berupaya untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kesempatan yang setara dalam kehidupan politik dan sosial. Dalam konteks yang lebih elegan politik identitas berfungsi sebagai alat untuk mengamankan hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok-kelompok agar menjadi lebih eksis.

Untuk mencapai representasi dan partisipasi politik yang lebih inklusif, masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok identitas memiliki kebutuhan dan perspektif yang berbeda-beda. Dengan adanya politik identitas, masing-masing kelompok dapat memiliki wakil yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka secara khusus. Representasi yang inklusif dalam kehidupan politik memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

Dalam memperteguh keberadaan dan membentuk identitas yang kuat, politik identitas menjadi satu-satunya cara yang digunakan. Di Indonesia keberagaman agama, suku, budaya, dan etnis, telah memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional yang unik. Teologi multikulturalisme membantu masyarakat mengenali dan menghargai keberagaman serta toleran terhadap yang berbeda dengan tujuan utamanya membangun kekuatan bersama guna menghadapi tantangan untuk memajukan negara (Nego, 2020). Karena identitas yang kuat dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam menjalankan pembangunan dan mengatasi permasalahan bersama.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2022 mengungkapkan, mayoritas responden percaya bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi

nilai-nilai toleransi. Dengan 62, 2 % responden menilai masyarakat masih menjunjung tinggi nilai toleransi, dan 10, 4 % responden menyatakan masyarakat sangat toleran. Menurut Rangga Eka Sakti peneliti Litbang Kompas, nilai toleransi pada warga dengan usia muda lebih besar. Dimana masyarakat yang berusia di bawah 40 tahun nilai toleransi mencapai 74 %. Angka ini lebih besar dari masyarakat yang berusia 40 tahun ke atas dengan selisih 4 %. Persentase ini semakin tinggi pada masyarakat usia kurang dari 24 tahun dengan angka 78 %. Tingginya persepsi atas toleransi ini menjadi fondasi kuat atas kohesi sosial bangsa Indonesia (Ni'am, 2022).

Dalam membangun masyarakat yang inklusif dan toleran, kehadiran politik identitas penting untuk menjaga keseimbangan antara pengakuan identitas satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sebab menjelang pemilu menjalankan politik identitas secara sehat dan bertanggung jawab tidaklah mudah, dan apabila mampu dijalankan maka dapat mendorong dialog, toleransi, dan pengertian antar kelompok identitas. Dalam masyarakat yang inklusif dan toleran, setiap individu dan kelompok dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain (Yunus, 2014).

Untuk menjaga kelanggengan hidup sesama, sikap saling menghormati antar etnis, suku, dan agama wajib dipupuk bersama-sama. Sikap ini sebagai upaya untuk membangun saling tenggang rasa, (Elsa Kristina Hutapea, Puguh Santoso, Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, Achmed Sukendro, 2023). Sebuah data yang dirilis oleh litbang Kompas, memperlihatkan bahwa tenggang rasa terhadap perbedaan agama sebesar 47,6%, perbedaan pilihan politik sebesar 32,7%, perbedaan suku sebesar 9,8%, tidak tahu sebesar 7, 8%, dan perbedaan lainnya 2,1%.



Sumber Litbang Kompas 2022.

Diagam di atas menggambarkan sikap tenggang rasa antar suku, etnis, dan agama sesuatu yang esensial di jaga dan dipelihara menjelang tahun-tahun politik. Karena berbagai kemungkinan akan terjadi, dan potensi terbesar ketika politik identitas dibangun secara eksklusif yang kemudian dapat memperkuat polarisasi, konflik, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Politik identitas yang tidak bertanggung jawab juga dapat memecah belah masyarakat dan merusak ikatan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan politik identitas dengan bijak, mempromosikan kesatuan dalam keragaman, dan membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Dalam politik identitas diskriminasi dan marginalisasi kadang kala menjadi bagian yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu (Ramadhani et al., 2023). Beberapa kelompok identitas sering mengalami ketidakadilan sistemik, penindasan, atau ketidakselarasan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Politik identitas memberikan platform untuk melawan diskriminasi dan memperjuangkan keadilan bagi kelompok-kelompok tersebut. Melalui politik identitas, mereka dapat mengorganisir diri, memobilisasi massa, dan memperoleh kekuatan politik yang dapat menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat.

Berpijak dari uraian di atas, politik identitas harus mampu menciptakan ruang dialog antar kelompok-kelompok yang berbeda. Ketika kelompok identitas mengartikulasikan kepentingan mereka, hal ini memungkinkan dialog terbuka yang konstruktif perlu dilakukan secara kontinu. Politik identitas yang sehat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling mendengarkan, memahami perspektif satu sama lain, dan mencari kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Dalam proses ini, politik identitas dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan menciptakan kesepahaman yang lebih dalam di antara kelompok-kelompok identitas dalam memperkuat demokrasi menjelang atau sesudah pelaksanaan pemilu.

### **Politisasi Agama Menjelang Pemilu**

Pemilu menjadi wadah bagi masyarakat untuk memilih perwakilan politik mereka untuk berkiprah di parlemen. Jalan menuju parlemen ditempuh dengan berbagai cara, salah satu cara yang lumrah dilakukan oleh banyak calon politik dengan memolitisasi agama sebagai alat politik. Penggunaan agama untuk kepentingan politik menjelang pemilu bukan sesuatu yang baru di negara kita ini, politisasi ini ada yang dilakukan secara terselubung melalui simbol-simbol agama atau secara terbuka dengan memanfaatkan mimbar-mimbar agama.

Politisasi agama cara paling ampuh dalam membius masyarakat untuk tunduk kepada calon politik terutama bagi mereka yang memiliki afiliasi agama yang kuat. Calon politik yang mampu menghubungkan diri mereka dengan nilai-nilai agama tertentu cenderung mendapatkan dukungan lebih banyak dari kelompok agama tersebut (Dzulfikri et al., 2020). Politisasi agama menciptakan polarisasi pemilih berdasarkan agama, yang dapat mengaburkan penilaian pemilih tentang kualifikasi, program, dan rekam jejak calon politik.

Beberapa kasus sosial belakangan ini muncul di masyarakat akibat dari meningkatnya polarisasi agama. Isu-isu agama diangkat dalam politik yang kemudian menyebabkan perpecahan antar kelompok agama. Para calon politik membuat wacana atau membangun retorika yang tajam sehingga dapat menciptakan konflik dan ketegangan-ketegangan baru antar komunitas agama-agama yang berbeda. Politisasi agama memiliki potensi untuk memicu konflik sosial antar-kelompok agama (Takdir, 2017). Retorika yang keras, serangan verbal, atau penyebaran narasi yang menghasut dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan di antara masyarakat. Perbedaan politik yang didasarkan pada perbedaan agama dapat memunculkan ketegangan, bahkan dalam kasus ekstrem, bisa berujung pada kekerasan di dalam masyarakat. Politisasi agama yang tidak bertanggung jawab atau ekstrem dapat merusak kerukunan sosial dan mengancam stabilitas negara. Dan pada tahap selanjutnya politisasi agama dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika politik diwarnai oleh faktor agama, perdebatan lebih berfokus pada identitas dan simbol agama daripada pada isu-isu kebijakan yang substansial (Diinis Sipa, 2021). Hal ini mengurangi ruang bagi pemilih untuk mengevaluasi calon berdasarkan program dan kualifikasi mereka. Dalam demokrasi yang sehat, preferensi pemilih seharusnya didasarkan pada pemahaman yang luas dan pemilihan yang berdasarkan rasionalitas, bukan semata-mata berdasarkan faktor agama.

Dalam menghadapi politisasi agama menjelang pemilu, penting untuk meningkatkan pendidikan politik dan literasi agama. Pendidikan politik yang baik dan literasi agama yang kritis dapat membantu pemilih memahami isu-isu yang lebih luas dan membedakan antara politisasi agama yang bertanggung jawab dan ekstrem. Pendidikan politik yang inklusif harus mempromosikan pengertian tentang pentingnya pemilihan berdasarkan kualifikasi, program, dan integritas calon politik, bukan semata-mata berdasarkan faktor agama. Untuk mengatasi politisasi agama yang merugikan, perlunya dialog dan kolaborasi antar-aktor politik, pemimpin agama, dan masyarakat sipil. Dialog yang terbuka dan inklusif dapat membantu membangun

pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok agama. Kolaborasi antara aktor-aktor ini juga penting dalam mempromosikan politik yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bersama

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks politik Indonesia, calon politik dan partai-partai politik memiliki peran krusial dalam menentukan arah hidup bangsa. Banyaknya kepentingan politik, serta kuatnya persaingan antar calon politik telah menyeret calon politik dan partai politik mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara melakukan politisasi agama dan polarisasi sosial sehingga telah menyebabkan kebingungan dalam masyarakat. Selain dua cara tersebut, politik identitas juga menjadi elemen penting dalam kerangka politik Indonesia karena memainkan peran dalam memperkuat kesadaran keberagaman antar kelompok identitas. Politik identitas dan politisasi agama tidak selalu berjalan harmonis sebab berbagai perlawanan akan dilakukan oleh kelompok marginal dan minoritas. Meskipun demikian fakta lapangan menunjukkan berbagai strategi akan dilakukan oleh calon politik untuk mendapatkan dukungan pemilih dengan memanfaatkan afiliasi agama. Hal ini dapat mengarah pada polarisasi masyarakat dan mengaburkan pemahaman tentang kualifikasi dan program calon politik.

Untuk menghadapi tantangan ini, pendidikan politik dan literasi agama yang kritis menjadi kunci dalam membentuk masyarakat yang cerdas secara politik dan mampu memahami isu-isu secara holistik. Melalui pendidikan politik yang inklusif, masyarakat dapat memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan kualifikasi, bukan hanya faktor agama semata. Kemudian untuk menjaga kerukunan sosial dan menghindari politisasi agama yang berlebihan memerlukan kolaborasi antar aktor politik, pemimpin agama, dan masyarakat sipil. Melakukan dialog terbuka dan inklusif salah satu strategi dalam memperkuat pemahaman antara kelompok-kelompok identitas yang berbeda, serta mempromosikan politik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan toleransi. Mengingat kompleksitas dan tantangan yang ada, menjaga demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif masyarakat, keterbukaan terhadap berbagai perspektif, dan peningkatan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi. Meskipun terdapat hambatan seperti politisasi agama dan polarisasi sosial setiap menjelang pemilu, juga terdapat peluang untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis melalui pendidikan politik yang lebih baik serta penghargaan terhadap keragaman dan

toleransi. Dengan cara ini, Indonesia dapat terus memperkuat fondasinya sebagai negara demokratis yang berpegang pada nilai-nilai keberagaman, dialog, dan perdamaian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. (2018). POLITISASI AGAMA DI ERA DIGITAL DAN PENANGANANNYA. *Proceeding Seminar Nasional Politik Dan Hubungan Internasional, Volume 1 N.*
- Clarissa Rile Hayward, R. W. (2010). Identity and Political Theory. *Journal of Law & Policy, Volume 33.*
- Diinis Sipa, A. M. (2021). Marketing Politik Kampanye Religius Pemilu di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 6(2)*, 150. <https://doi.org/10.14421/jkii.v6i2.1196>
- Dzulfikri, R., Rianti, K. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Filsafat Sebagai Ruang Introspeksi dalam Menyikapi Isu Politisasi Agama. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 16(1)*, 53–64. <https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6821>
- Elsa Kristina Hutapea, Puguh Santoso, Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, Achmed Sukendro, P. W. (2023). Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No.* <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4811>
- Farisa, F. C. (2023). Survei SMRC: Kondisi Politik Nasional Dinilai Memburuk 3,5 Tahun Terakhir. *28 Maret 2023.*
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics, 3(1)*, 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetensi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No.*
- International, T. (2023). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022. *31 Januari.*
- Lestari, Y. S. (2018). POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA: ANTARA NASIONALISME DAN AGAMA. *Journal of Politics and Policy, Volume 1 N.* <https://doi.org/10.21776/UB.JPPOL.2018.001.01.2>
- Makdori, Y. (2021). Survei SMRC: Kondisi Politik Memburuk dalam 2 Tahun Terakhir. *26 Desember.*
- Mallia Hartani, S. A. N. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol 2, No.* <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>
- Marta, B. (2020). Konflik Agama dan Krisis Intoleransi: Tantangan atau Mimpi Buruk Keberagaman Indonesia? *6 Agustus.*
- Nego, O. (2020). Teologi Multikultural sebagai Respon terhadap Meningkatnya Eskalasi Politik Identitas di Indonesia. *PASCA : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, 16(2)*, 121–139. <https://doi.org/10.46494/psc.v16i2.109>
- Ni'am, S. (2022, November). Survei Litbang “Kompas”: Sikap Toleransi Masyarakat Tinggi, tetapi Dibayangi Ancaman Konflik Agama dan Politik. *14 November 2022.*
- Putra, G. B., & Riyanto, F. X. A. (2023). Menelusik politik identitas di Kalimantan Barat berdasarkan perspektif filsafat politik Armada Riyanto. *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1)*, 9. <https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948>
- Ramadhani, I., Fitriyani, Y., & Randi, M. (2023). Hak Politik Kelompok Minoritas. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 4(1)*, 27–40.

**Firdaus M. Yunus, Taslim HM. Yasin, Syamsul Rijal (2023) – Politik Identitas dan Politisasi Agama dalam Konteks Pemilu di Indonesia. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial – Volume 9 Nomor 2 September 2023. Hal. 121-137. DOI. 10.29103/jsds.v9i2.12590**

<https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.120>

Rizqullah Naufan, M., & Hannase, M. (2021). Mendudukan Ulang Populisme Islam: Karakter Politik Identitas dan Perkembangannya Di Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 2(6), 1120–1133. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.256>

Safrihsyah Syarif, F. M. Y. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Ushuluddin Publishing.

Takdir, M. (2017). Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia). *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(01), 45. <https://doi.org/10.32332/riayah.v2i01.962>

Yunus, F. M. (2014). AGAMA DAN PLURALISME. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 13(2), 213. <https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.72>

Zahrotunnimah, Z. (2018). Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme di Indonesia. *'Adalah*, 2(10), 93–94. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i10.9437>